

Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan ASN Guru

Alex Denni

Deputi SDM Aparatur KemenPANRB

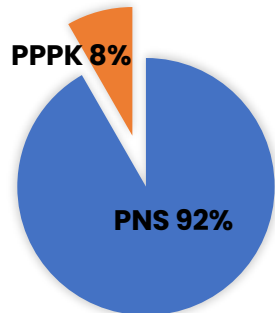


PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA

ASN INDONESIA

per 27 Maret 2023*

4.311.160



PNS 3.952.431



PPPK 358.729



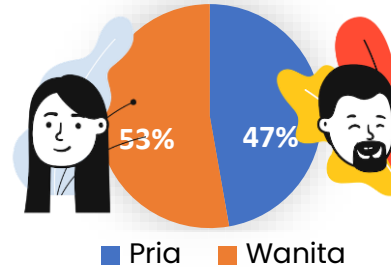
Instansi Pusat
Instansi Daerah



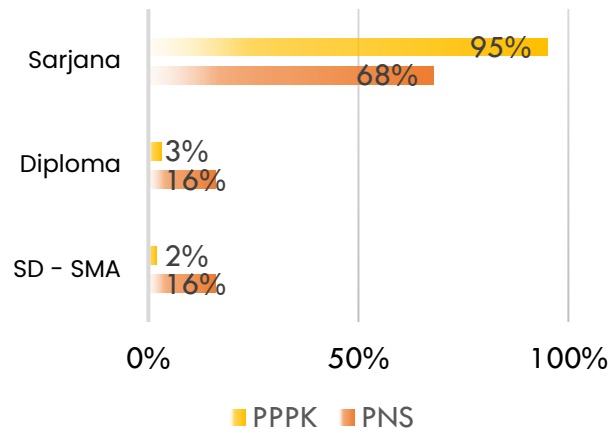
PUSAT
973.724

DAERAH
3.337.436

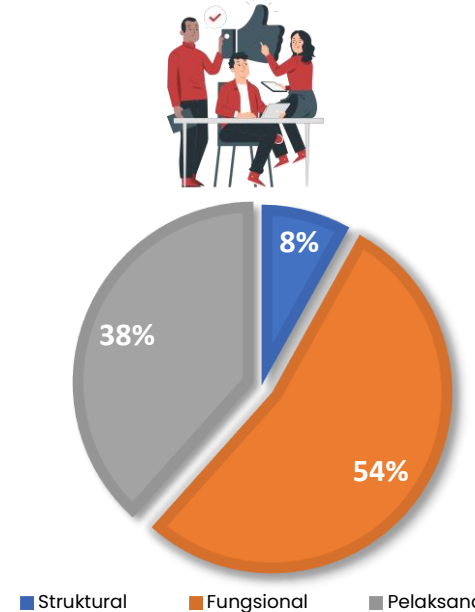
GENDER



JENJANG PENDIDIKAN



JABATAN



JF Medis dan Nakes
PNS : 360.637
PPPK : 10.102



Guru
PNS : 1.239.631
PPPK : 332.841



Teknis
PNS : 493.176
PPPK : 6.068



Dosen
PNS : 75.430
PPPK : 1.340



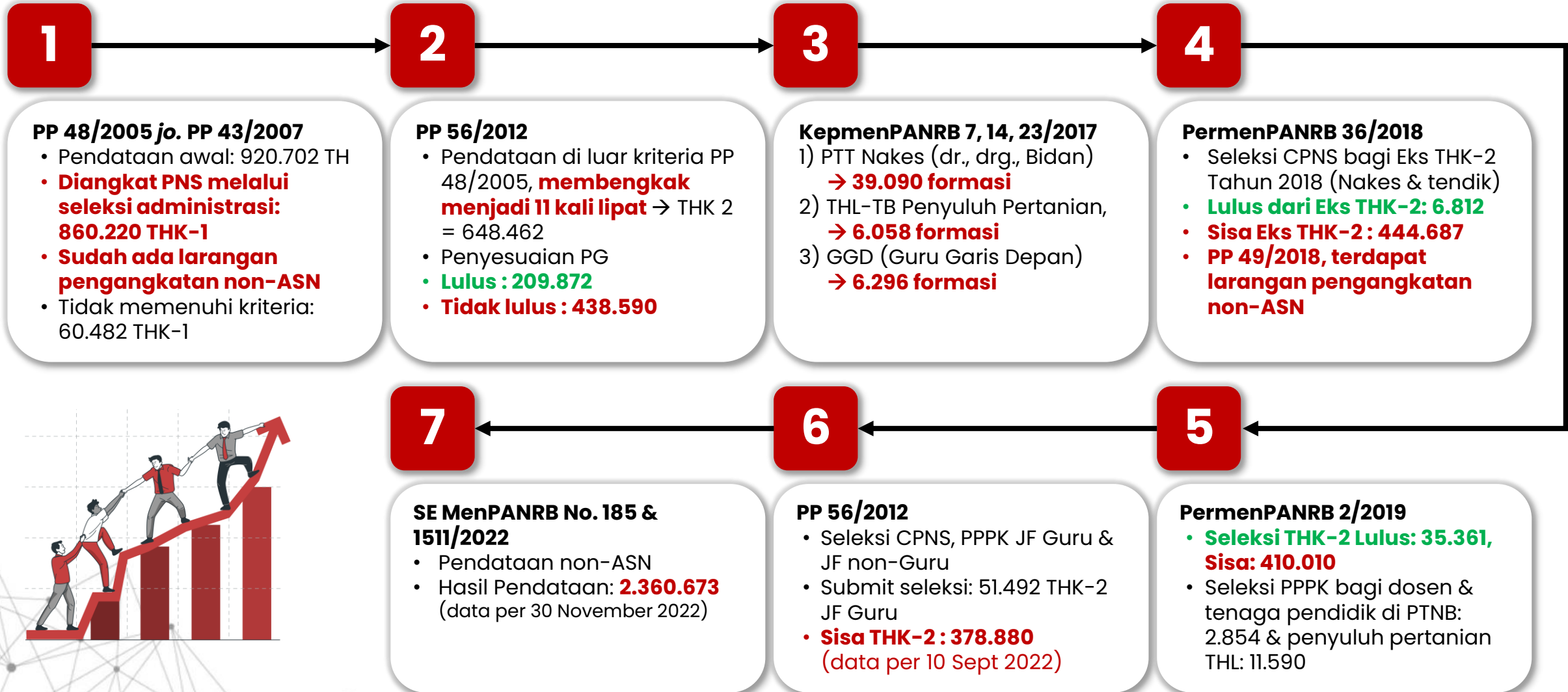
PPPK Penyuluh Pertanian
11.981



PPPK Tendik
1.432

*Sumber : Badan Kepegawaian Negara

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN NON-ASN



PERKEMBANGAN PENDATAAN NON-ASN

Berdasarkan Instansi

66

PUSAT

529

DAERAH

TOTAL
595

Berdasarkan SPTJM

325.517

PUSAT

2.029.575

DAERAH

TOTAL
2.355.092

Berdasarkan Jabatan



731.524
Pendidik



204.902
Kesehatan



74.362
Penyuluh



609.255
Teknis



735.049
Administrasi

PERTIMBANGAN PENYELESAIAN TENAGA NON ASN

GUIDING PRINCIPLES: Berdasarkan Masukan dari DPR dan Stakeholder

Hindari PHK Masal

1

2

Tidak Mengurangi Pendapatan Yang Diterima saat ini

Hindari Pembengkakan Anggaran

3

4

Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada



Tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik



Mendorong Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara



Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara termasuk tenaga non ASN dan eks THK-II untuk berkompetisi menjadi ASN

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

PRINSIP MERITOKRASI

Setiap **WNI** mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui **penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain** yang dibutuhkan dalam jabatan.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS jo.
PP 17 TAHUN 2020

PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PPPK

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK



RENCANA KEBIJAKAN PEMENUHAN ASN TAHUN 2023 – 2030

1. Sektor Pendidikan



- mencakup Tenaga Guru di Pemda, Tenaga Guru di Instansi Pusat, Tenaga Dosen

POSITIVE GROWTH

mengacu proyeksi kebutuhan dari instansi Pembina:
Kemendikbudristek dan Kemenag

2. Sektor Kesehatan



- mencakup Tenaga Kesehatan di Pemda dan Instansi Pusat

POSITIVE GROWTH

mengacu proyeksi kebutuhan dari instansi Pembina:
Kementerian Kesehatan

3. Tenaga Teknis Fungsional



- Sesuai nomenklatur pada Permenpan 45/2022

ZERO GROWTH

sesuai bidang prioritas nasional dan potensi kewilayahan

4. Tenaga Teknis Pelaksana



NEGATIVE GROWTH

PEMENUHAN JABATAN TEKNIS SESUAI SEKTOR PRIORITAS NASIONAL

**peningkatan nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi di sektor riil, dan industrialisasi



*RPJMN 2020-2024, Lampiran I, BAB 2, Hal. 31; Rapat Teknis PIC Penyusunan Kebijakan COL ASN, Feb 2021.

PEMENUHAN LAYANAN DASAR

*RPJMN 2020-2024, Lampiran I, BAB 2 Hal. 31;
Rapat Teknis PIC Penyusunan Kebijakan COL
ASN, Feb 2021.

01

SEKTOR PENDIDIKAN



02

SEKTOR KESEHATAN



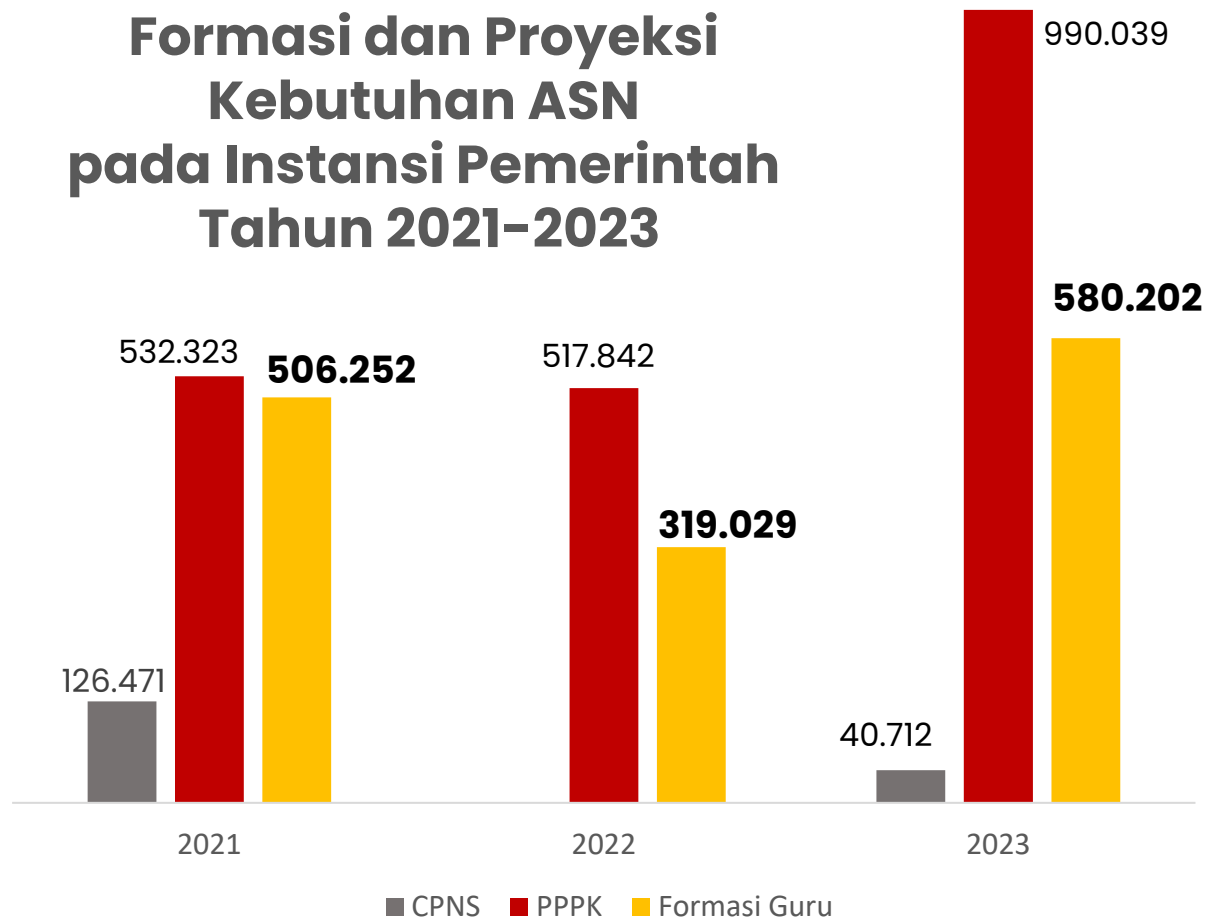
03

SEKTOR PENEGAKAN HUKUM



FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA TAHUN SEBELUMNYA

Formasi dan Proyeksi Kebutuhan ASN pada Instansi Pemerintah Tahun 2021-2023



2021

Menteri PANRB menetapkan sebesar
1.165.316 Formasi ASN

2022

Menteri PANRB menetapkan sebesar
836.871 Formasi ASN

2023

Proyeksi kebutuhan ASN sebesar
1.610.953*

*Sesuai surat Menteri PANRB kepada Menteri Keuangan tanggal 21 Feb 2023 Nomor B/382/M.SM.01.00/2023

PENETAPAN KEBUTUHAN ASN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN 2021

Instansi	Jumlah Kebutuhan (a)	Jumlah Penetapan (b)
Pusat	83.669	62.144
Daerah	1.191.718	605.475
Guru PPPK*	1.002.616	506.252
PPPK Non Guru	70.008	20.645
CPNS	119.094	78.578
Total Pusat & Daerah	1.275.387	667.619

Keterangan :

(a) Sesuai surat MenPANRB No. B/1379/M.SM.01.00/2020 dan Surat MenKeu No. S-49/MK.02/2021
(b) Cut-Off 13 September 2021

53.589
53 K/L

8.555
8 Sekolah Kedinasan

127.609
32 Pemprov

477.866
475 Pemkab/Pemkot

Formasi

117.462	Guru
10.147	Non-Guru

Formasi

7.439	CPNS
120.170	PPPK

Formasi

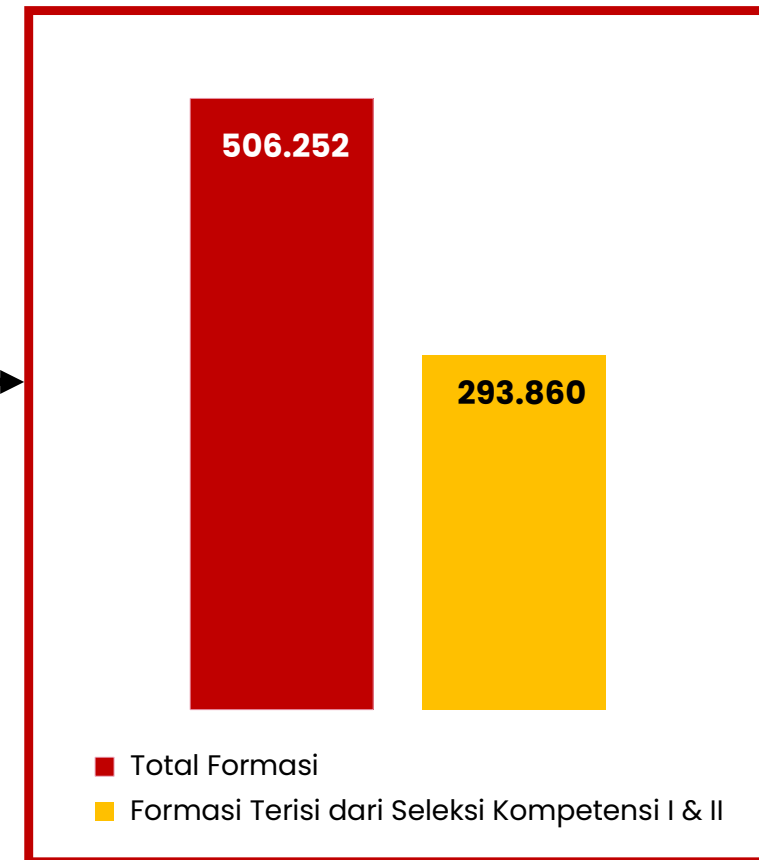
388.790	Guru
89.076	Non-Guru

Formasi

71.139	CPNS
406.727	PPPK

PENETAPAN KEBUTUHAN/FORMASI PPPK JF GURU TAHUN 2021

Instansi	Jumlah Kebutuhan (a)	Jumlah Penetapan (b)
Pusat	83.669	62.144
Daerah	1.191.718	605.475
Guru PPPK*	1.002.616	506.252
PPPK Non Guru	70.008	20.645
CPNS	119.094	78.578
Total Pusat & Daerah	1.275.387	667.619



Keterangan:





(a) Sesuai surat MenPANRB No. B/1379/M.SM.01.00/2020 dan Surat MenKeu No. S-49/MK.02/2021

(b) Cut-Off 13 September 2021

KEBIJAKAN SELEKSI PPPK GURU TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 28 TAHUN 2021

Peserta yang **berhak** mendaftar :

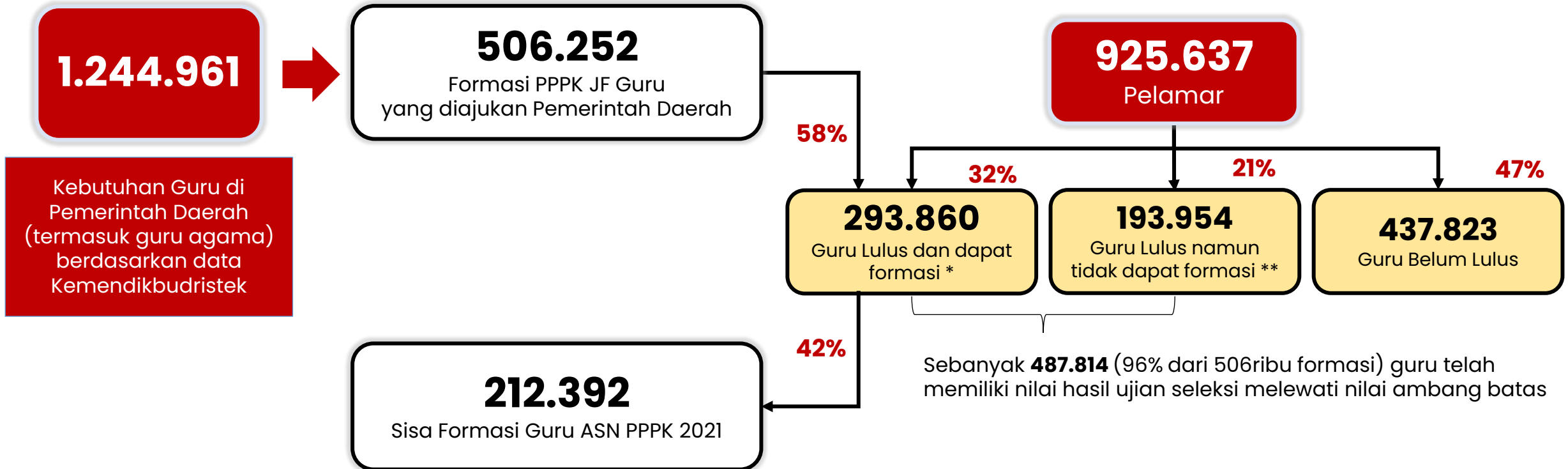
-  **THK - II**
-  **Guru Non-ASN** di sekolah negeri
-  **Guru Swasta**
-  **Lulusan PPG**



Kriteria Penambahan Nilai	Jumlah Tambahan Nilai	Keterangan
1 Memiliki Sertifikat Pendidik linier dengan jabatan yang dilamar	100% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar.
2 Usia diatas 35 tahun	15% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data Dapodik).
3 Penyandang Disabilitas	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan metode verifikasi video.
4 THK-II	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).

***bentuk afirmasi**

STATISTIK PELAMAR PPPK JF GURU TAHUN 2021



117.939 formasi (**56%**) diantaranya belum pernah dilamar

Sumber : Panitia Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021

* Sebanyak **41.620** guru swasta yang lulus mendapatkan formasi

** Sebanyak **44.866** guru honorer di sekolah negeri tempat dia mengajar tidak mendapatkan formasi

293.860 Guru telah lulus seleksi dan mengisi **58%** formasi PPPK JF Guru yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tahun 2021

STATISTIK PENDAFTARAN CASN 2021

Sumber : PPSS BKN, PDPIK BKN, Panitia Seleksi PPPK Guru Kemendikbud

	FORMASI	PENDAFTAR	MEMENUHI SYARAT MENGIKUTI SELEKSI	KELULUSAN	
PPPK GURU	667.619	4.507.043	3.339.697	416.231	Jumlah kelulusan akhir Seleksi Kompetensi 1 dan 2 yang diberkaskan NIP
PPPK NON-GURU	26.071	105.242	42.008	11.810	Jumlah Kelulusan Seleksi Akhir dan diberkaskan NIP
CPNS	126.741	3.476.164	2.372.057	112.076	Jumlah Kelulusan Seleksi Akhir dan diberkaskan NIP
SEKOLAH KEDINASAN	8.555		28.968	6.387	Jumlah peserta yang telah lulus SKD dan masuk sekolah kedinasan

- Seleksi CPNS dan PPPK Non Guru difasilitasi oleh BKN.
- Seleksi PPPK Guru difasilitasi oleh Kemendikbudristek.

KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2022

“**Pengadaan ASN Tahun 2022 dilakukan hanya untuk PPPK**”

SE Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 tanggal 22 Oktober 2021

1

**PANDEMI COVID-19 DAN
PENYEDERHANAAN BIROKRASI**

Perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas.

2

**BERFOKUS PADA PELAYANAN DASAR
(GURU DAN TENAGA KESEHATAN)**

Sisa formasi kebutuhan guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

3

KEBERPIHAKAN KEPADA EKS THK-II

Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak

4

GAJI DAN TUNJANGAN

Kebutuhan ASN diusulkan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang – undangan.

Catatan :

Gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Perpres 98 Tahun 2020

KEBUTUHAN ASN NASIONAL TAHUN 2022

NO.	PERUNTUKKAN	KEBUTUHAN	FORMASI YANG DITETAPKAN
1.	INSTANSI PUSAT	95.324	93.195
	• Tenaga Guru	50.000	24.900
	• Tenaga Dosen	15.000	9.591
	• Tenaga Kesehatan	7.000	8.321
	• Tenaga Teknis Lainnya	23.324	50.383
2.	INSTANSI DAERAH	1.054.276	424.843
	• PPPK Guru	758.018	319.029
	• PPPK Tenaga Kesehatan	255.249	80.049
	• PPPK Tenaga Teknis Lainnya	41.009	25.765
3.	Jumlah Alokasi PNS untuk Lulusan Sekolah Kedinasan	8.941	8.578
4.	Jumlah Alokasi Khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat	41.888	41.367
TOTAL KEBUTUHAN DAN FORMASI		1.200.429	567.983

*Sesuai Keputusan Menteri PANRB No. 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2022

Prioritas 1

Pelamar yang telah Lulus Seleksi Tahun 2021 dan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB/PG), yang terdiri dari:

1. THK-II,
2. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri,
3. Lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru), dan
4. Guru Swasta

Prioritas 2

THK-II

(pelamar tidak memenuhi NAB)

Prioritas 3

Guru Non-ASN di Sekolah Negeri
terdaftar di Dapodik, masa kerja min. 3 tahun

KEBIJAKAN SELEKSI GURU PADA TAHUN 2022

Umum

Lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru)

terdaftar pada database kelulusan PPG
di Kemendikbudristek

**Pelamar Umum yang terdaftar
di DAPODIK**

Seleksi Guru Tahun 2022
memprioritaskan Guru THK-II dan
Guru Non-ASN di Sekolah Negeri



STATISTIK PENERIMAAN SELEKSI CASN TAHUN 2022



FORMASI TENAGA GURU YANG DITETAPKAN

319.029

472 Instansi Daerah



■ Tidak Terisi ■ Terisi

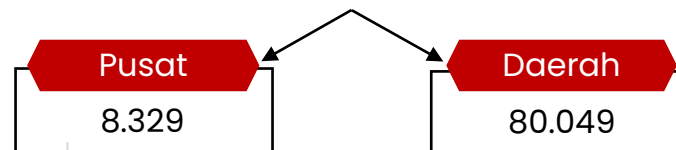
Keterisian Formasi
78.50%



FORMASI TENAGA KESEHATAN YANG DITETAPKAN

88.378

27 Instansi Pusat & 387 Instansi Daerah



■ Tidak Terisi ■ Terisi

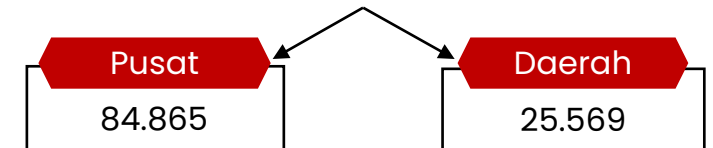
Keterisian Formasi
78.59%



FORMASI PPPK TEKNIS YANG DITETAPKAN

110.434

54 Instansi Pusat & 305 Instansi Daerah



■ Tidak Terisi ■ Terisi

Keterisian Formasi
46.80%

STATISTIK DETIL PENERIMAAN SELEKSI CASN TAHUN 2022

PPPK GURU

Formasi: **319.029**

Daerah: 472
319.029

Pelamar 364.031
LULUS 250.432

Kelulusan: **(78,5%)**

PPPK NAKES

Formasi: **88.378**

Pusat: 27	Daerah: 387
8.329	80.049

Pelamar 21.404	Pelamar 235.611
LULUS 6.838 (82,1%)	LULUS 62.617 (78,2%)

Kelulusan: **69.455 (78,6%)**

PPPK TEKNIS

Formasi: **110.434**

Pusat: 54	Daerah: 305
84.865	25.569

Pelamar 369.675	Pelamar 186.614
LULUS 42.371 (49,9%)	LULUS 9.316 (36,4%)

Kelulusan: **51.687 (46,8%)**

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PEMENUHAN PPPK GURU INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2024

Identifikasi Permasalahan

Belum adanya kesesuaian antara proyeksi kebutuhan Guru dalam DAPODIK, dengan perhitungan kebutuhan Pemerintah Daerah

Formasi yang disiapkan Kementerian PANRB belum dapat dipenuhi secara optimal oleh Pemerintah Daerah

Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembayaran penghasilan PPPK Guru



Solusi

Kemendikbudristek melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kesesuaian data kebutuhan guru

Mendorong pemerintah daerah melalui Kemendagri, Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan usulan pemenuhan kebutuhan Guru

Dalam pemberian penghasilan PPPK Guru perlu dilakukan koordinasi antara Kemendagri, Kemenkeu, & Kemendikbudristek

ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023



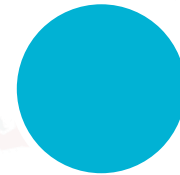
01

Fokus pada pelayanan dasar (GURU DAN TENAGA KESEHATAN) dengan seoptimal mungkin **menyelesaikan masalah Non-ASN**



02

Memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta **digital dan data scientist** secara terukur



03

Merekrut **CPNS** dengan sangat selektif



04

Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan **terdampak oleh transformasi digital**

KEBUTUHAN ASN NASIONAL PADA TAHUN 2023

1.	PUSAT	46.666
	• CPNS Dosen	15.858
	• CPNS Tenaga Teknis Lainnya	18.595
	• PPPK Dosen	6.742
	• PPPK Tenaga Guru	12.000
	• PPPK Tenaga Kesehatan	12.719
	• PPPK Tenaga Teknis Lainnya	15.205
2.	DAERAH	943.373
	• PPPK Guru	580.202
	• PPPK Tenaga Kesehatan	327.542
	• PPPK Tenaga Teknis Lainnya	35.629
3.	Jumlah Alokasi PNS untuk Lulusan Sekolah Kedinasan	6.259
TOTAL KEBUTUHAN		1.030.751

STATISTIK USULAN FORMASI ASN TAHUN 2023

CUT-OFF 10 MEI 2023



Teknis

CPNS

Pusat: **18.695**
Daerah: **0**

PPPK

Pusat: **100.776**
Daerah: **79.034**



Guru

PPPK

Pusat: **169**
Daerah: **278.102**

78

INSTANSI

Rekap Usul Kebutuhan 2023 (Pusat)

- Sudah Upload : **72**
- Belum Usul : **6**

546

INSTANSI

Rekap Usul Kebutuhan 2023 (Daerah)

- Instansi Usul : **501**
- Instansi yang Tidak Usul : **45**



Nakes

PPPK

Pusat: **22.829**
Daerah: **165.219**



Dosen

CPNS

Pusat: **23.390**
Daerah: **0**

PPPK

Pusat: **8.339**
Daerah: **0**



- Terima Kasih -

DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MENGUSULKAN FORMASI ASN TAHUN 2023

INSTANSI PUSAT

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Badan Standardisasi Nasional
3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
6. Ombudsman Republik Indonesia

INSTANSI DAERAH

1. Pemerintah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Kab. Karo
3. Pemerintah Kab. Padang Lawas
4. Pemerintah Kab. Nias Barat
5. Pemerintah Kota Binjai
6. Pemerintah Kota Pematang Siantar
7. Pemerintah Kota Tanjung Balai
8. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
9. Pemerintah Kab. Seluma
10. Pemerintah Kota Bengkulu
11. Pemerintah Kab. Lampung Utara
12. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
13. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
14. Pemerintah Kota Bekasi
15. Pemerintah Provinsi Banten
16. Pemerintah Kab. Bondowoso
17. Pemerintah Kab. Sambas
18. Pemerintah Kab. Melawi
19. Pemerintah Kab. Pulang Pisau
20. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
21. Pemerintah Kab. Berau
22. Pemerintah Kab. Gorontalo
23. Pemerintah Kab. Poso
24. Pemerintah Kab. Takalar
25. Pemerintah Kota Palopo
26. Pemerintah Kab. Muna Barat
27. Pemerintah Kab. Gianyar
28. Pemerintah Provinsi Papua
29. Pemerintah Kab. Puncak Jaya
30. Pemerintah Kab. Paniai
31. Pemerintah Kab. Yahukimo
32. Pemerintah Kab. Tolikara
33. Pemerintah Kab. Sarmi
34. Pemerintah Kab. Waropen
35. Pemerintah Kab. Supiori
36. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
37. Pemerintah Kab. Lanny Jaya
38. Pemerintah Kab. Yalimo
39. Pemerintah Kab. Nduga
40. Pemerintah Kota Jayapura
41. Pemerintah Kab. Mamuju
42. Pemerintah Provinsi Papua Selatan
43. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
44. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
45. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya